

ABSTRAK

Gempa bumi Propinsi Sumatera Barat 30 September 2009 telah membawa dampak kerusakan besar baik korban jiwa maupun harta benda termasuk kerusakan rumah masyarakat di 12 kabupaten/kota. Akibat kerusakan rumah tersebut diperlukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pasca bencana yang dimotori oleh BNPB dan BPBD. Peran BNPB dan BPBD dalam penyaluran bantuan perumahan tahap I perlu dianalisis kinerjanya.

Kinerja BNPB dan BPBD dalam penyaluran bantuan perumahan dianalisa melalui adanya sinergi kedua badan tersebut dan efektivitas serta efisiensinya dalam penyaluran bantuan perumahan.

Metode AHP digunakan untuk mengukur kinerja BNPB dan BPBD melalui penentuan skala prioritas kegiatan dalam penyaluran bantuan perumahan. Penelitian dilakukan melalui FGD dan pengisian kuesioner dari para ahli yang dapat mewakili stakeholder dan memahami permasalahan pada lingkup penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan village planning menjadi prioritas tertinggi penyelesaiannya dengan alternatif solusi pembenahan RTRW secara terpadu dan dapat mengantisipasi bencana alam. Sejalan dengan hasil penelitian yang perlu menjadi perhatian adalah sinergi BNPB dan BPBD yang belum optimal, keberadaan TPT yang belum formal sesuai peraturan dan mekanisme penyaluran bantuan perumahan cenderung lamban.

Peran BNPB dan BPBD dalam penyaluran bantuan perumahan belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali baik mengenai sinergi kedua badan tersebut maupun efektivitasnya dalam kegiatan tersebut.